

A. Literatur :

Cahaya, Suhandi dan Surachmin. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dempster, Quentin. 2006. *Whistleblower*. Jakarta: Elsam.

Djaja, Ermasyah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*.

Bandung: Mandar Maju.

Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta:Liberty.

Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Malang: Cetakan Ketiga. Banyumedia Publishing.

Mahmud Marzuki, Peter, 2007 *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat bukti (seri Pemerataan Keadilan 10), cetakan 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maryani, Enong. 1997. *Antropologi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Lies Sulistiani, et.. Al., *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*.

Prinst, Darwan.2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.Bandung : Citra Adhitya Bakti

Projodikoro, Wirjono.2004.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:

PT. Raja Gravindo.

Pohan, Agustinus. 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Lasaran.

Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Adhitya Bakti.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Bandung : Mandar Maju.

Ramelan, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Salam, Moch. Faisal 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, Nikolas.2009.Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum,Bogor: Ghlmia Indonesia, Cet I.

Surodibroto,Soenarto.2007.*KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Radjagrafindo Persada.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Samosir, C. Djisman, 1985. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*. Bina Cipta: Bandung.

Taufik Makarao, Mohammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.

Wijaya, Firman, 2008, *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Maharini Press.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

_____, Undang-

Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lainnya

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sigit Artantojati, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H, 20 Juni 2013, Nilai Pembuktian Telekonferensi,
SuaraMerdeka.com

<http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/>,

Diakses tanggal 13 November 2013.

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukumacara-pidana/>, diakses pada tanggal 15 November 2013.

<http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-buktidalam-hukum.html> diakses pada tanggal 15 November 2013.

<http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/> Diakses tanggal 13 November 2013.

http://www.wikiapbn.org/artikel/Tindak_Pidana_Korupsi, diakses pada tanggal 20 November 2013.

<http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html> diakses pada tanggal

3

Desember

2013

<http://profil->

[lanka.blogspot.com/2012/01/pembuktian-dalam-hukumacara-pidana.html?m=1](http://profil-lanka.blogspot.com/2012/01/pembuktian-dalam-hukumacara-pidana.html?m=1) diakses pada tanggal 20 November 2013.